

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP HUKUM WARIS**
(Telaah Hukum Waris Adat dan Islam di Jawa Barat)



Oleh :
Sambas Prabawa

UNIVERSITAS TERBUKA

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA**

Desember 1995

KATA PENGANTAR

Akhirnya Studi literatur ini selesaikan juga meskipun mengalami banyak hambatan dalam mencari sumber-sumber kepustakaan. Tetapi dalam penulisan ini tidak berpengaruh pada kualitas laporan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kami, lakukan penelaahan.

Penulis, pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah atas perkenan dan petunjukNya sehingga, penulis dapat melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan kewajibannya.

Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada lembaga-lembaga kepustakaan yang memberikan berbagai informasi dalam mencari sumber penulisan. Selain itu kepada Dekan FKIP-UT yang telah menyetujui dan mengetahui dalam penyelesaian penulisan studi literatur, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelbagai pihak yang tidak mungkin kami sebut satu persatu atas segala bantuan dan partisipasi dalam mendukung penulisan ini.

Akhirnya harapan kami tidak lain adalah semoga penulisan kepustakaan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan UT pada khususnya.

Jakarta, Desember 1995
Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Perumuan Masalah	3
3. Tujuan Penulisan	3
4. Metode Penulisan	4
BAB II. PENDEKATAN TEORITIS	
a. Pola Pemikiran Teoritis	4
b. Beberapa Teori	10
1. Teori Soepomo	10
2. Teori Kesadaran Hukum	11
3. Teori Talcott Parsons	14
BAB III. SENDI-SENDI DASAR HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM	
a. Sendi-sendi Dasar Hukum Waris Adat	16
b. Sendi-sendi Dasar Hukum Waris Islam	27
BAB IV. ASAS-ASAS HUKUM YANG TERCERMIN DARI PUTUSAN PERADILAN	
A. Putusan putusan Peradilan Umum	34
B. Putusan-putusan Peradilan Agama	38
BAB V. KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM	39
BAB VI. KESIMPULAN	
A. Umum	49
B. Khusus	49
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya bagi masyarakat Indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik daripada yang telah dicapai sebelumnya. Fungsi hukum dalam pembangunan tidak sekadar sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) saja, melainkan lebih dari itu, yaitu melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan.

Fungsi hukum disini adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendakinya dengan menciptakan pola-pola baru, juga berarti mengubah atau bahkan menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dua fungsi hukum tersebut merupakan paduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang sedang membangun, seperti Indonesia.

Karena dalam pembangunan itu sendiri terdapat hal-hal yang harus dipelihara serta dilindungi, di lain pihak hukum diperlukan untuk menciptakan pola yang sesuai dengan pembangunan dan agar perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan tersebut berjalan dengan tertib dan teratur.

Pemikiran tersebut di atas sesuai dengan politik hukum nasional, sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara diantaranya mengemukakan bahwa: "Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan Hukum sesuai dengan kesadaran *Hukum Rakyat* yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke

arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh".

Selanjutnya, pokok-pokok kebijaksanaan tersebut dijabarkan lebih lanjut di dalam Repelita II Bab 27, yang memuat rencana pembangunan nasional dibidang hukum secara terinci yaitu program pembinaan hukum nasional beserta proyek-proyeknya.

Begitu pula, Ismail Saleh (1989) mengemukakan ada 3 (tiga) dimensi pembangunan hukum nasional yang patut mendapat perhatian, yaitu dimensi pemeliharaan, dimensi pembaharuan, dan dimensi penciptaan. Tatanan hukum yang ada harus tetap dipelihara, sekalipun sudah tidak sesuai lagi, sepanjang tatanan hukum baru belum dapat diciptakan. Itu untuk mencegah timbulnya kekosongan undang-undang. Sementara itu, usaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan tatanan hukum yang ada dilakukan untuk bagian-bagian tertentu yang tidak cocok dan tidak sesuai lagi dengan keadaan. Dimensi itu diperlukan agar tatanan hukum yang ada tidak perlu dibongkar keseluruhannya. Dimensi penciptaan berarti dimensi dinamika dan kreativitas. Pada dimensi ini diciptakan perangkat peraturan perundang-undangan yang baru, yang sebelumnya memang belum pernah ada.

Landasan atau dasar-dasar pokok kebijaksanaan hukum nasional tersebut, ternyata bahwa pembangunan dibidang hukum harus diarahkan kepada peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional antara lain dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi, dan unifikasi hukum pada bidang-bidang tertentu, dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Upaya kodifikasi hukum tersebut sesungguhnya bermaksud mengganti tata hukum yang kini berlaku - yang dibuat oleh pemerintah kolonial - dengan tata hukum baru yang benar-benar mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Berkaitan dengan usaha ini, timbul masalah, sistem hukum mana yang mewakili kesadaran hukum masyarakat, yang dapat menjadi sumber utama pembentukan hukum nasional. Hal ini disebabkan, karena hingga saat ini

terdapat tiga sistem hukum yang mempengaruhi atau merupakan sumber dari tata hukum positif Indonesia, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat. Untuk mengetahui sistem hukum mana yang merupakan pencerminan kesadaran hukum masyarakat masa kini dan untuk masa akan datang, perlu dilakukan suatu telaah atau kajian yang mendalam.

Khusus dibidang kodifikasi hukum perdata sering banyak dilakukan penelitian-penelitian baik oleh Departemen Kehakiman maupun berbagai perguruan tinggi. Namun bidang hukum perdata waris, terutama menyangkut hukum kewarisan Islam dan adat masih langka dilakukan penelitian-penelitian yang memadai.

Bertolak dari alasan tersebut, penulis mencoba mengkaji dengan maksud untuk mengetahui apakah penemuan-penemuan penting yang dilakukan oleh Soepomo pada lebih kurang setengah abad lampau itu masih mencerminkan kesadaran hukum masyarakat pedesaan di Jawa Barat atau memang terjadi perubahan, sebagai akibat perubahan sosial yang berlangsung secara cepat, yang banyak mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di daerah tersebut.

2. Perumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, masalah yang akan menjadi focus perhatian di tulisan ini adalah:

- a. Hukum waris apakah yang berlaku ?
- b. Sejauh mana penerapan waris adat dan hukum waris Islam ?
- c. Sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat, khusus di bidang hukum waris.

3. Tujuan Penulisan

Penulisan studi pustaka ini bertujuan untuk:

- a. Mengkaji dan menelaah hukum waris apakah yang berlaku
- b. Mengkaji dan menelaah sejauh mana penerapan hukum waris adat dan hukum waris Islam.

- c. Mengkaji dan menelaah sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya di bidang hukum waris.

4. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan studi pustaka ini didasarkan pada bahan-bahan yang dikumpulkan melalui literatur-literatur, data sekunder dari berbagai instansi, jurnal, teks book dan sebagainya.

BAB II. PENDEKATAN TEORITIS

a. Pola Pemikiran Teoritis

Dapat diketahui bahwa hukum yang mulia pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah hukum adat. Untuk jangka masa yang cukup lama hukum adat ini sebagai suatu norma hukum, bersama-sama dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama Hindu, memainkan peranannya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.

Agama islam memasuki Indonesia sekitar abad XIII melalui pulau Sumatera. Dari pulau ini terus berkembang ke wilayah-wilayah lain, termasuk pulau Jawa. Di Jawa Barat, pusat-pusat pengembangan agama Islam ini diketahui melalui aktivitas perdagangan, juga melalui perkawinan, kebatinan dan kesaktian, pengobatan, kesenian, arsitektur, dan pendidikan. Dalam waktu yang relatif singkat, agama Islam berhasil mendesak agama Hindu berkat usaha para Wali.

Banyak diantara mereka bahkan memberlakukan hukum Islam dalam hubungan hukum sehari-hari. Kebiasaan ini kemudian dilakukan pula oleh para generasi berikutnya hingga kedatangan para penjajah dari benua Eropa. Atas dasar itulah, para ahli hukum Belanda menganggap, bahwa sebelum dan sesudah tahun 1300 di Indonesia berlaku hukum Islam. Pandangan ini melahirkan sebuah teori yang disebut *receptio in complexu* yang dipelopori oleh ahli

hukum Belanda seperti C.F. Winter, Solomon Keyzer, dan mencapai puncak ketenarannya melalui L.W.C van den Berg.

Namun ajaran teori *receptio* tidak bertahan lama, sebagai penggantinya dikemukakan oleh Snouck Hurgronje teorinya bernama *heori receptie*. Teori ini membicarakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku di kalangan rakyat Indonesia (pada waktu itu: bumi putra) adalah hukum adat. Hukum Islam meresepsi terhadap hukum adat. Hukum Islam hanya mempunyai kekuatan berlaku jika hukum adat menghendakinya. Ajaran inilah yang kemudian digunakan dasar untuk menentang isi pasal-pasal yang termuat di dalam *Regeerings Reglement (RR)* tahun 1855 oleh van Vollenhoven beserta para pengikutnya.

Kritik-kritik para ahli hukum adat tersebut tampaknya cukup berhasil. Itu terbukti dengan adanya perubahan dalam politik hukum kolonial, yaitu tercermin dengan diundangkannya *Staatsblad* 1906: 364, diberlakukan di Hindia Belanda dengan *Staatsblad* 1907: 204, yang mengubah bunyi pasal 75 PR lama menjadi "..... diikuti peraturan hukum yang berhubungan dengan dengan agama dan kebiasaan itu".

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa hukum adat dan hukum Islam memiliki taraf yang sejajar dalam daya berlakunya di Indonesia. Sebaiknya, daya berlaku sesuatu sistem hukum tidak disebabkan oleh meresepsinya sistem hukum tersebut pada sistem hukum yang lain, tetapi hendaknya disebabkan oleh adanya kesadaran hukum masyarakat yang nyata menghendaki bahwa sistem hukum itulah yang berlaku. Dengan anggapan ini, maka akan tampak bahwa di antara sistem hukum adat dan Islam terdapat kemungkinan berlaku seiring sejalan dalam suatu masyarakat tertentu. Pemikiran ini kenyataannya berlaku pada masyarakat Minangkabau misalnya, dalam pewarisan harta pusaka berlaku hukum adat, sedang harta sepencarian berlaku hukum Islam.

Seperti dikemukakan oleh Soepomo (1955), "*Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang*

nyata dari rakyat". Oleh sebab itu maka hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Dalam bahasa *Friedrich Carl von Savigny*, hal tersebut disebut *Volksgeist* (jiwa bangsa). *Volksgeist* berbeda-beda menurut tempat dan zaman, yang dinyatakan dalam bahasa adat-istiadat dan organisasi sosial rakyat. Dalam perkembangan itulah maka dapat diperkirakan bahwa hukum adat akan terpengaruh oleh hukum Islam, faktor struktur sosial, dan faktor proses sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kohler mengatakan "..... law as social fact, inseparably connected with the culture of societies". Sehubungan dengan itu, dia mengemukakan:

- (a) Cultural values must be protected; new form also must be developed.
- (b) It is the task of the law, based on appropriate juristic postulates, to provide a context within which cultural values may flourish and develop. Thus will the law assist in the task of the creation of new values.
- (c) Juristic postulates are society's ideas of right given expression in legal institutions".

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa penyelidikan hukum dapat dilakukan dengan cara mempelajari proses terbentuknya norma hukum dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, atau dengan cara mempelajari timbulnya kebiasaan-kebiasaan masyarakat sebagai akibat adanya suatu norma hukum.

Bertitik tolak dari penemuan Soepomo, sekitar lima puluh tahun lalu, tentang hukum adat Jawa Barat, khususnya dalam bidang kewarisan, yang sebagian besar merupakan hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam, serta memandang hukum adat sebagai hukum dinamis, maka dapat diperkirakan bahwa hukum kewarisan adat akan terpengaruh oleh hukum kewarisan Islam, faktor struktur, dan faktor proses.

Dengan memisahkan adat yang mempunyai akibat-akibat hukum, dalam arti merupakan keputusan-keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala adat, dari adat yang tidak mempunyai akibat hukum, maka hukum kewarisan yang hidup dalam masyarakat belum tentu merupakan hukum kewarisan adat. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat tumbuh dan berkembang secara dinamis, sehingga perasaan hukum terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya pun akan bergerak secara dinamis pula.

Hal tersebut ditegaskan kembali pada Ketetapan MPR No.II/1988, yaitu pada Bagian UMUM, Arah dan Kebijakan Pembangunan Pola Umum Pelita Kelima, yang menyatakan:

"Kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran perlu ditingkatkan sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kegairahan, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung kemantapan stabilitas nasional. Sehubungan dengan itu perlu dilanjutkan upaya pembaharuan hukum serta peningkatan kemampuan dan peningkatan aparatatur pemerintah, terutama aparatatur penegak hukum, serta ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat".

Untuk mengetahui hukum mana yang merupakan pencerminan kesadaran hukum masyarakat masa kini dan untuk masa akan datang, perlu dilakukan penelitian yang mendalam secara berkesinambungan.

Hukum bukan saja merupakan gejala normatif, melainkan juga merupakan gejala sosial atau empiris. Hal tersebut diketahui dari pengertian hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (1975), yaitu:

"Jika kita artikan dalam arti yang luas maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Dengan lain perkataan suatu pendekatan yang normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila kita hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh".

Hukum sebagai gejala normatif dan gejala sosial atau empiris dapat pula disimpulkan dari pendapat Jellinek, bahwa hukum sebagai gejala normatif dapat dilihat dari kata-kata "asas-asas dan kaidah-kaidah" pada pengertian hukum di atas, sementara hukum sebagai gejala sosial atau empiris dapat dilihat dari kata-kata "lembaga-lembaga dan proses-proses".

Politik hukum Indonesia, telah cukup jelas bahwa dalam upaya pembentukan, penggantian, dan perubahan hukum harus benar-benar mencerminkan kesadaran hukum masyarakat, kesadaran terhadap nilai-nilai budaya masyarakat. Dengan demikian maka hukum adat, hukum Islam, hukum kebiasaan, dan hukum "Barat" mempunyai kedudukan yang penting dalam pembentukan tata hukum nasional.

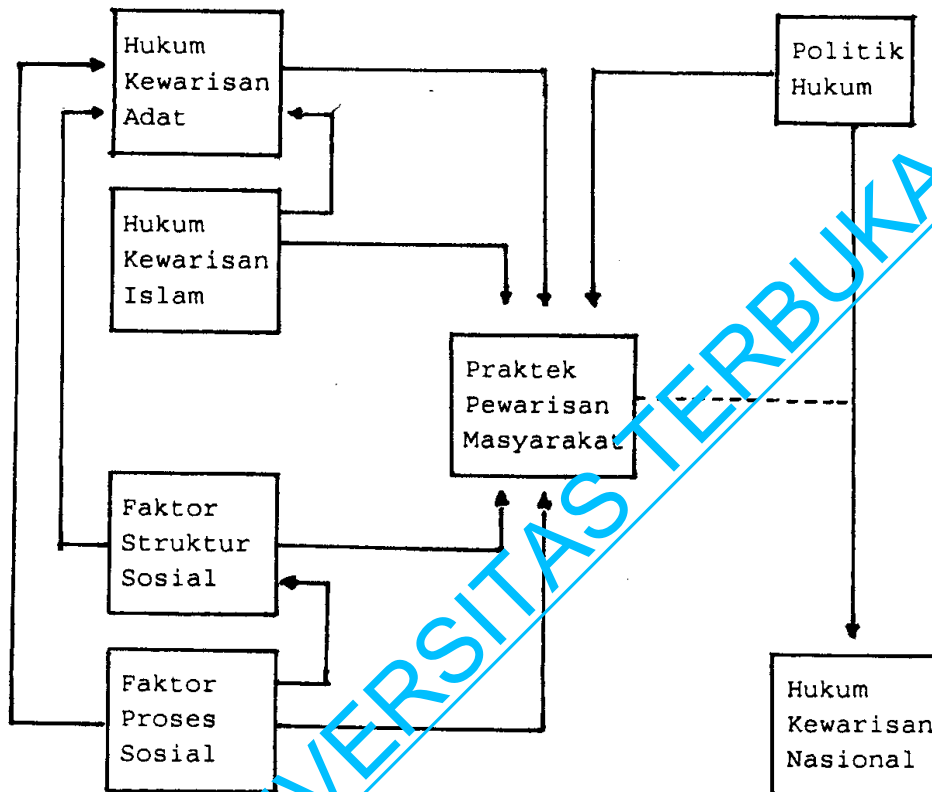
Sedangkan konsep hukum kewarisan Islam mengandung arti seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam istilah bahasa Arabnya disebut *Faraid*.

Namun demikian yang dimaksud dengan hukum kewarisan (waris) adat, ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini berlangsung ketika orang-tua masih hidup. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengalihan harta benda dan bukan harta benda tersebut.

Dalam penulisan ini, kajian hukum kewarisan, yang akan dibahas tidak terbatas pada harta pusaka atau harta sepencarian

saja, akan tetapi kedua macam harta tersebut. Oleh karena hingga saat ini belum diketahui dari berbagai literatur secara pasti apakah terhadap kedua macam harta tersebut, di Jawa Barat, berlaku ketentuan yang berbeda seperti halnya di Minangkabau.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka kerangka teoritis dan konseptualisasinya dalam lingkup hukum kewarisan nasional, lihat gambar.



Gambar 1.
Kerangka Teoritis dan konseptualisasi
dalam lingkup Hukum Waris

Gambar di atas tercermin, bahwa hukum kewarisan yang hidup dalam masyarakat dipengaruhi oleh lima variabel, yaitu hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Islam, faktor struktur sosial, faktor proses sosial, dan politik hukum. Suatu variabel tertentu dapat mempengaruhi atau dipengaruhi variabel lainnya.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran tentang praktek pewarisan pada masyarakat, dilakukan kajian terhadap variabel-variabel yang bersifat normatif dan empiris, yang secara nyata memberikan corak terhadap praktek pewarisan tersebut.

Untuk melihat variabel, yang bersifat empiris, dalam praktek pewarisan masyarakat maka dikaji proses timbulnya aspek normatif dari fakta-fakta yang bersifat empiris tersebut.

Dengan melakukan kajian terhadap fakta-fakta empiris, yang berlangsung secara berulang serta dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang sudah seharusnya, dan proses timbulnya aspek normatif pada fakta-fakta tersebut diharapkan dapat menggambarkan hukum kewarisan yang diterapkan masyarakat.

b. Beberapa Teori

Beberapa teori yang digunakan dalam rangka kajian ini, sebagai landasan pemikiran dan alat analisis, adalah sebagai berikut.

1. Teori Soepomo

Pandangan Soepomo (1983) tentang hukum adat adalah "suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat".

Temuan Soepomo tersebut bila ditelusuri dilandasi pemikiran F.C. von Savigny dengan mazhab sejarah dan kebudayaannya dan van Vollenhoven. Oleh sebab itu, maka hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Dalam bahasa Friedrich Carl von Savigny, hal tersebut disebut *Volksgeist* (jiwa bangsa). *Volksgeist* berbeda-beda menurut tempat dan zaman, yang dinyatakan dalam bahasa adat-istiadat dan organisasi sosial rakyat.

Hukum adat tidak saja merupakan adat-adat yang mempunyai akibat-akibat hukum, atau keputusan-keputusan yang berwibawa dari

kepala-kepala rakyat, karena antara adat yang mempunyai akibat hukum dan yang tidak mempunyai akibat hukum tidak ada pemisahan yang tegas. Dengan kata lain bahwa setiap kebiasaan yang kemudian menjadi perilaku sehari-hari merupakan adat atau hukum adat. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Soepomo, yaitu.

"..... dalam penyelidikan hukum adat yang menentukan bukan banyaknya perbuatan-perbuatan yang terjadi, meskipun jumlah itu adalah penting sebagai petunjuk bahwa perbuatan itu adalah dirasakan sebagai hal yang diharuskan oleh masyarakat. Meskipun jumlah perbuatan yang sama di dalam daerah yang bersangkutan itu hanya ada dua, apabila perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang memang sudah seharusnya, maka dari dua fakta itu sudah dapat ditarik kesimpulan adanya suatu norma hukum".

Atas pemikiran Soepomo tersebut, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa:

"Pendapat Soepomo di atas perlu digarisbawahi oleh karena menunjukkan dari sumber manakah hukum adat data diungkapkan, yaitu dari masyarakat dan dari pemimpin-pemimpinnya. Ada kecenderungan bahwa data yang diperoleh dari pemimpin-pemimpin itu terutama menyangkut hal-hal ideal, yang menurut tradisi perlu dipertahankan. Oleh karena itu, data itu perlu sekali dilengkapi dengan informasi yang secara langsung diperoleh dari warga masyarakat biasa"

2. Teori Kesadaran Hukum

Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting di dalam politik hukum khususnya, serta pembangunan pada umumnya yang merupakan suatu perubahan yang direncanakan. Baik dalam Repelita II maupun Repelita III, kesadaran hukum merupakan salah satu asas daripada pembangunan nasional di Indonesia. Masalah kesadaran hukum sering kali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan

kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai *variabel bebas*, sedangkan taraf ketaatan merupakan *variabel tergantung* (Soekanto, 1982). Selain itu kesadaran hukum dapat merupakan *variabel antara* yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Perilaku yang nyata terwujud dalam ketaatan hukum, namun hal itu tidak dengan sendirinya hukum mendapat dukungan sosial, dukungan sosial hanyalah diperoleh, apabila ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan, oleh karena kepuasan merupakan hasil pencapaian hasrat akan keadilan.

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Untuk menggambarkan keterkaitan antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum terdapat suatu hipotesis (Kutchinsky, 1973), yaitu:

"A strong legal consciousness is sometimes considered the cause of adherence to law (sometimes it is just another word for that) while a weak legal consciousness is considered the cause of crime and evil".

Dari berbagai arti hukum, salahsatu di antaranya, hukum diartikan sebagai jaringan nilai-nilai yang merupakan refleksi dari suatu masyarakat. Masalah nilai-nilai dalam hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Hal itu disebabkan kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki atau yang seharusnya ada.

Kesadaran hukum dalam penulisan ini diartikan sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama mungkin pula tidak dengan hukum yang berlaku. Hukum dalam arti disini menunjuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan.

Dengan demikian, hukum disini meliputi baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Contoh hukum Islam dan hukum adat, walaupun hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (*hukum tertulis*). Akan tetapi, adalah suatu kenyataan, kedua sistem hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan hukum.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. Validitas hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Soekanto (1982) terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan, yaitu: Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Namun dari indikator-indikator dalam kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, begitu juga sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, begitu juga sebaliknya, apabila derajat kesadaran hukumnya rendah, maka derajat ketaatan terhadap hukum juga rendah.

Apabila dipandang secara sempit, konsepsi kesadaran hukum seakan masyarakat terdapatnya peraturan-peraturan hukum terlebih dahulu sebelum kesadaran hukum timbul. Pemikiran tersebut tentu tidak salah apabila memang suatu peraturan telah ada sebelumnya. Dalam sudut pandang yang lebih luas, konsepsi ini dapat diterapkan dari dua titik pusat. Apabila titik pusat kesadaran hukum adalah peraturan-peraturan hukum, melalui konsepsi ini dapat dilihat sampai sejauhmana efektivitas peraturan-peraturan hukum tersebut dalam masyarakat. Sementara bila titik kesadaran hukum adalah fakta-fakta sosial, melalui konsepsi ini dapat

dilihat proses pembentukan hukum dari fakta-fakata sosial tersebut.

3. Teori Talcott Parsons

Sistem sosial adalah suatu sistem interaksi, jadi suatu tindakan manusia, yang melibatkan sejumlah individu. Sistem tindakan manusia itu, sebagai suatu sistem, tersusun atas sejumlah bagian, yang disebut subsistem, yang saling berkaitan dan saling mendukung. Tiap bagian atau subsistem mempunyai fungsi tertentu terhadap sistem yang meliputinya. Parsons menyebutkan adanya empat fungsi, yaitu:

- (1) Fungsi adaptasi, yaitu penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya.
- (2) Fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*), yang merupakan pencapaian sasaran atau tujuan. Parsons beranggapan bahwa suatu tindakan diarahkan pada tujuannya. Namun perhatian yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial.
- (3) Fungsi integrasi (*Integration*) adalah memadukan atau mengakomodasikan pelbagai faktor yang terkait pada pencapaian tujuan. Yang terdiri atas penjaminan koordinasi yang perlu antara unit-unit dari sistem sosial berkaitan dengan kontribusi tiap unit pada organisasi dan berfungsinya secara keseluruhan.
- (4) Fungsi pemeliharaan pada atau latensi (*patterns maintenance* atau *Latency*) yaitu melestarikan pola-pola yang sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai.

Dari empat fungsi di atas, fungsi integrasi menempati kedudukan sentral bagi pengorganisasian masyarakat. Jika diterapkan model sistem sosial yang dikemukakan Parsons, terhadap gejala hukum, maka titik berat hukum terletak pada fungsi

integrasi. Hukum diarahkan untuk mengakomodasikan keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan. Fungsi ini meliputi sistem kaidah (*sistem norma*) yang bertugas untuk mengoreksi perilaku yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang bersangkutan. Jadi kaidah-kaidah itu dalam integrasi sosial menuntut perilaku tertentu yang mewujudkan peranan-peranan tertentu.

Sebagai kerangka orientasi, kaidah-kaidah itu dalam situasi interaksi tertentu pula kaidah-kaidah ini dapat berperan sebagai kerangka orientasi perilaku karena berlaku sebagai sesuatu yang sah. Keabsahan kaidah-kaidah tersebut itu adalah karena ia dilegitimasi oleh kaidah-kaidah yang lebih umum yang berasal atau terdapat dalam sistem sosial yang lebih tinggi yaitu sistem kultural yang pada realitas tertinggi. Keabsahan dari kaidah yang lebih tinggi itu bertumpu pada konsensus tentang nilai-nilai di dalam masyarakat (*sistem kultural yang bersumber dari realitas tertinggi*).

Dengan menganalisis fungsi integrasi, maka akan tampak bahwa fungsi latensi dari hukum menunjuk pada pengendalian keterikatan pada nilai-nilai yang diyakini, yakni iktan loyalitas. Fungsi integrasi dari hukum menunjuk pada penafsiran terhadap kaidah untuk menentukan apakah ada konsistensi dan apakah kaidah itu sesuai dengan nilai-nilai yang dipandang tinggi dalam sistem kemasyarakatan yang bersangkutan. Fungsi pencapaian tujuan dari hukum menunjuk pada pengendalian terhadap kekuasaan politik.

Kendati demikian, fungsi adaptasi dari hukum menunjuk pada pengendalian kekuasaan ekonomi dan sosial. Fungsi integrasi dengan aspek latensinya mengusahakan agar unsur-unsur dari sistem, yakni para warga dalam masyarakat tetap loyal terhadap tujuan-tujuan dari sistem sebagai keseluruhan yang selalu harus tetap tertib dan seimbang.

BAB III. SENDI-SENDI DASAR HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM

Pembahasan tentang Hukum Waris pada dasarnya menyangkut 3 (tiga) hal pokok, yaitu apa yang merupakan objek pewarisan (*harta peninggalan*), siapa yang berhak atas itu (*ahli waris*), dan bagaimana aturan pembagiannya. Oleh karena itu, pembahasan dimulai dari sendi-sendi dasar hukum Adat dan hukum waris Islam.

Pembahasan tentang hal-hal tersebut akan dibatasi pada masyarakat pedesaan Jawa Barat, berdasarkan hukum Adat setempat dan hukum Islam. Yang dimaksud hukum Adat pada bagian ini adalah hukum adat yang ditemukan oleh para ahli jauh sebelumnya, yang secara lebih khusus adalah penemuan-penemuan "Soepomo" pada masyarakat Jawa Barat, seperti tertulis pada bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*.

Namun demikian, pada bagian-bagian tertentu yang pengaturannya sudah dibuat secara nasional, pembahasan akan dirujuk pula pada ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran tentang politik hukum Indonesia terhadap hal-hal tersebut.

a. Sendi-sendi Dasar Hukum Waris Adat

Hukum waris berkaitan dengan proses pengalihan harta peninggalan dari seseorang (*pewaris*) kepada ahli warisnya, berkaitan dengan hal tersebut Soepomo menyatakan bahwa:

"Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak

mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut".

Harta peninggalan dibedakan antara yang dapat dibagi-bagi dengan yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan, pada umumnya merupakan harta bukan benda, namun pada beberapa lingkungan hukum adat tertentu dapat pula berupa harta benda.

Pada masyarakat Jawa Barat dikenal harta asal suami, harta asal istri, dan harta sekaya. Ketiga jenis harta tersebut merupakan harta perkawinan. Meninggalnya salah seorang dari suami atau istri, dapat pula keduanya, akan mengubah harta tersebut menjadi harta peninggalan. Harta peninggalan itulah yang merupakan objek kewarisan. Oleh karena itu terlebih dahulu perlu diketahui harta -harta apa yang merupakan harta peninggalan tersebut.

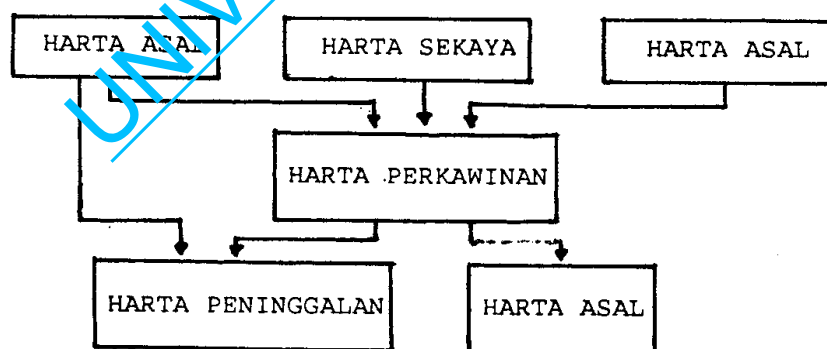
Soepomo mengemukakan bahwa, "Pula dalam peristiwa-peristiwa pembagian harta peninggalan tersebut tidak diperiksa terlebih dahulu apa yang merupakan barang gura kaya dan apa yang merupakan barang asal, tetapi seluruhnya dianggap sebagai kesatuan harta peninggalan. Dengan kata lain, seperti ia kemukakan pula pada bagian-bagian lainnya, Soepomo bermaksud mengatakan bahwa harta peninggalan terdiri dari harta asal suami, harta asal istri, dan harta sekaya".

Pada hukum Jawa Barat, pemisahan harta asal masing-masing dengan harta sekaya hanya dikenal selama perkawinan, sementara sesudah salah seorang atau kedua suami-istri meninggal maka kesemuanya itu bersatu menjadi harta peninggalan. Namun demikian, pada bagian lainnya, Soepomo pun mengemukakan pula bahwa penyatuan keseluruhan harta tersebut hanya terjadi apabila suami-istri tersebut mempunyai anak dan tidak mempunyai istri-istri dan atau anak-anak lain dari perkawinan terdahulu, yang tidak tinggal dengan mereka. Dengan demikian, sebetulnya Soepomo tetap

memandang adanya pemisahan harta-harta tersebut, sekalipun untuk hal yang pertama tidak tampak secara nyata.

"Segala harta keluarga, dengan tidak mengindahkan asalnya, jadi baik barang asal suami, barang asal istri, maupun barang gono-gini, barang pencarian, akan dialihkan kepada anak-anak", demikian kata Soepomo. Bagian dari tiap-tiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya adalah sama, dengan tidak membedakan agama yang dianut dan siapa yang lahir lebih dahulu. Di beberapa daerah memang terdapat kekecualian, yaitu dikenal adanya istilah *sepikul segendong*, dimana hak laki-laki adalah dua kali hak perempuan.

Dari uraian di atas maka alur harta peninggalan dari harta asal dan harta sekaya dalam hukum adat Jawa Barat, yang ditemukan oleh Soepomo, adalah seperti ditunjukkan pada gambar 2. Harta peninggalan merupakan harta asal pewaris jika ia tidak meninggalkan janda, dan harta sekaya jika dia meninggalkan seorang janda, keturunan dari keduanya, dan tidak meninggalkan keturunan lain yang tidak tinggal bersama; atau merupakan harta asal pewaris dan harta sekaya untuk selebihnya. Dalam hal yang kedua, jika si janda kemudian melakukan perkawinan lagi maka harta peninggalan dipisahkan dari harta asal si janda, sehingga harta peninggalan merupakan harta asal pewaris dan harta sekaya saja.



Gambar 2.

Alur Harta Peninggalan dari Harta Asal dan Harta Sekaya
dalam Hukum Adat Lama

Proses pengalihan harta perkawinan terhadap anak-anak berlangsung sejak orang-tua masih hidup, melalui cara pemberian mutlak. Pemberian tersebut pada umumnya dilakukan terhadap anak-anak yang telah dewasa, dan itu mempunyai sifat sebagai suatu pewarisan. Hal tersebut dapat dilihat pada proses pewarisan apabila orang-tua telah meninggal, yaitu harta peninggalan hanya dibagikan pada anak-anak yang belum memperoleh waris secara pemberian mutlak. Dalam hal harta peninggalan masih cukup banyak atau terlalu sedikit, umumnya penyelesaian dilakukan secara musyawarah dengan memperhatikan dasar persamaan hak bagi setiap anak.

Tentang pemasukan kembali pemberian mutlak terhadap anak-anak untuk diperhitungkan kembali dalam pembagian waris, Subekti (1990) menyebutkannya sebagai suatu kewajiban.

Penetapan objek dari harta peninggalan untuk setiap ahli waris pada dasarnya berpijak pada asas manfaat atau asas pemanfaatan. Bagian waris yang didapat oleh seorang ahli waris, sedapat mungkin, akan berupa barang yang sangat dekat manfaatnya dengan kehidupannya, sebagai modal penghidupan. Sebagai misal, seorang anak yang rajin bertani cenderung mendapatkan lahan pertanian.

Dalam hukum adat waris, anak-anak merupakan ahli waris utama. Perkara-perkara waris, yang timbul, biasanya disebabkan tidak adanya anak kandung. Anak yang lahir di luar perkawinan (*anak jadah*) termasuk kategori anak kandung dari ibunya.

Tentang kedudukan janda, kecuali *Priesterraad*, baik Soepomo, Ter Haar, Landrad, maupun Raad van Justitie mengemukakan bahwa, menurut hukum adat Jawa Barat, janda tidak merupakan ahli waris dari suaminya. Janda dipandang sebagai orang luar sehingga tidak merupakan ahli waris dari suaminya. Itulah seperti yang penulis kemukakan di atas, bahwa pada dasarnya Soepomo pun tetap mengakui adanya pemisahan antara harta asal masing-masing suami istri dan harta sekaya. Namun semuanya sepakat bahwa janda mempunyai

kedudukan yang istimewa, yaitu berhak tetap tinggal di rumah tangga dengan hak untuk memegang harta benda yang ditinggalkan suaminya, baik harta asal maupun harta sekaya, selama ia memerlukan untuk kehidupannya. Dengan kedudukannya yang istimewa tersebut maka janda dapat menahan kembalinya harta asal suaminya pada keluarganya, dalam hal tidak terdapatnya anak dan janda tersebut tidak kawin lagi.

Dalam hal terdapatnya anak, terdapat banyak ragam aturan yang diterapkan dalam hal pembagian dan pemakaian harta peninggalan (Soepomo), yaitu:

1. harta peninggalan (barang asal dari pihak suami, barang asal dari pihak istri dan barang gono-gini) dibagi-bagi antara segala anak-anak. Si Janda (ibu) berdiam pada salah seorang anaknya dan dipelihara oleh segala anak-anak atau cukup oleh anak yang ditumpangnya.
Janda (ibu) tidak mendapat bagian sedikit pun dari harta peninggalan tersebut, juga tidak dari barang asalnya sendiri dan juga tidak menuntut untuk mendapat bagian, oleh sebab kehidupannya telah terjamin;
2. mungkin pula si janda mendapat sebagian dari harta peninggalan, misalnya sebuah rumah dan sebidang sawah, mungkin barang yang dibagikan kepada janda itu kebetulan masuk golongan barang asalnya suami, sedang barang-barang lainnya dibagi-bagi antara anak-anak;
3. kemungkinan lain, ialah bahwa suami telah mewariskan sebidang sawah yang masuk golongan barang-asalnya suami sendiri, dan sebuah rumah yang masuk golongan barang gono-gini, kepada istri, sehingga setelah suami itu meninggal, sisa dari harta peninggalannya dibagi-bagi antara anak-anak.

Apa yang diuraikan diatas, mengenai kedudukan janda perempuan, pada dasarnya berlaku pula bagi janda laki-laki (duda). Namun dalam kenyataannya, janda laki-laki pada umumnya

masih mampu untuk mencari nafkah sendiri sehingga tidak begitu tergantung pada harta peninggalan istrinya.

Seperti telah diuraikan di muka, Soepomo dan Ter Haar memandang bahwa, di Jawa Barat, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang tuanya sendiri. Tentang kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, Soepomo maupun Ter Haar sepakat mengatakan sebagai bukan ahli waris. Namun Soepomo menyebutkan bahwa, menurut hukum adat Jawa Barat, anak angkat sepatutnya mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya, bahkan ada anak kandung sekalipun.

Sehubungan dengan itu, Soepomo menilai putusan Landrad Purworejo, 25 Agustus 1937, dan Kamar III Raad van Justitie, 24 Mei 1940, yang memutuskan bahwa harta gono-gini jatuh pada janda dan anak angkat, jika tidak terdapat anak kandung, sebagai putusan yang tepat. Dalam hal ini, penulis menilai Soepomo kurang konsisten terhadap pengertian harta peninggalan, yaitu disatu kesempatan dia memandang harta peninggalan sebagai keseluruhan harta perkawinan, tetapi di lain kesempatan dia memandang harta peninggalan terbatas pada harta asal.

Dengan demikian, seperti juga dikutip oleh Soepomo, Djoyodiguno dan Tirtawinata (1942) menyebutkan bahwa anak angkat menerima "air dari dua sumber air".

Seperti telah pula dikemukakan di atas, putusan Landrad Tasikmalaya, 16 September 1903, memuat pertimbangan, bahwa "menurut kebiasaan di daerah itu anak tiri atau anak angkat, bilamana tidak ada anak kandung, sepenuhnya dipandang sebagai anak kandung". Namun pada putusan Raad van Justitie, 17 Maret 1939, dikatakan bahwa anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tiri. Kedua putusan tersebut secara nyata berbeda. Adanya perbedaan tersebut dapat ditafsirkan dari 2 (dua) segi, yaitu menunjukkan adanya keragaman aturan dalam hukum adat, atau menunjukkan adanya perkembangan aturan dalam hukum adat.

Kedua putusan tersebut diinventarisir oleh Soepomo, sehingga ia mengatakan bahwa:

"Harta peninggalan jatuh kepada anak sebagai waris dan janda serta anak angkat, mungkin pula anak tiri, sebagai anggota rumah tangga yang ditinggalkan oleh si mati".

Dari perkataannya tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa perpindahan hak atas harta peninggalan dapat terjadi pada ahli waris (anak) atau terhadap anggota rumah tangga (janda, anak angkat, atau anak tiri). Apabila proses perpindahan yang pertama penulis namakan pewarisan, penulis tidak tahu persis istilah apa yang digunakan Soepomo untuk proses perpindahan yang kedua. Namun demikian, dengan memperhatikan asas tidak menelantarkan anggota keluarga yang bukan ahli waris, maka proses perpindahan yang kedua tersebut penulis namakan keterwarisan. Hilman Hadikusuma (1990) menyebut orang yang bukan ahli waris tetapi mendapatkan bagian harta peninggalan sebagai orang yang kewarisan.

Dengan demikian, maka harta peninggalan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu harta warisan dan harta jaminan keluarga. Harta warisan merupakan harta peninggalan yang menjadi hak para ahli waris, sementara harta jaminan keluarga merupakan harta peninggalan yang menjadi hak anggota keluarga lainnya (janda, anak angkat, dan anak tiri), yaitu seperti ditunjukkan pada gambar 3.

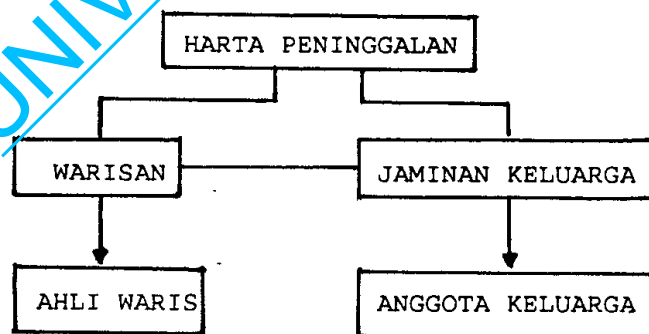


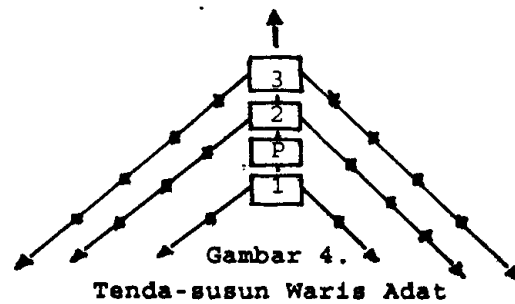
Diagram 3.

**Perpindahan Harta Peningkatan
terhadap Ahli Waris dan Anggota Keluarga**

Apabila Soepomo dan Ter Haar konsisten terhadap kedudukan anggota keluarga (janda, anak angkat, dan anak tiri) sebagai bukan ahli waris tetapi mempunyai kedudukan yang istimewa, yaitu berhak tetap tinggal di rumah tangga dengan hak untuk memegang harta peninggalan selama ia memerlukan untuk kehidupannya, maka harta jaminan keluarga merupakan hak pakai yang dimiliki anggota keluarga, yang bukan anak, atas harta peninggalan. Itu berarti, mereka tidak mempunyai hak untuk melakukan pengasingan terhadap harta peninggalan tersebut.

Dari uraian di atas, nyatalah bahwa pada hukum adat waris Jawa Barat, seperti ditemukan Soepomo limapuluh tahun lalu, pihak-pihak yang merupakan ahli waris adalah kerabat dari si mati. Kerabat yang dimaksud adalah kerabat dalam garis keturunan ke bawah dan ke atas. Hukum waris adat Jawa Barat tidak mengenal penarikan garis keturunan ke samping, tetapi mengenal penggantian kedudukan. Oleh karena itu anak kandung menempati urutan pertama, dengan pengganti semua keturunannya; orang tua menempati urutan kedua, dengan pengganti semua keturunannya; kakek/nenek menempati urutan ketiga, dengan pengganti semua keturunannya, dan seterusnya. Urutan penetapan ahli waris tersebut apabila digambarkan akan menyerupai suatu susunan tenda (kemah), sehingga penulis namakan "Tenda-susun Waris Adat", yaitu seperti terlihat pada gambar 4.

Dengan demikian, jika ada ahli waris tingkat pertama dan atau keturunannya, maka hak waris ahli waris tingkat kedua dan seterusnya menjadi tertutup. Begitu pula, jika tidak ada ahli waris tingkat pertama dan atau keturunannya, tetapi ada ahli waris tingkat kedua dan atau keturunannya, maka hak waris ahli waris tingkat ketiga dan seterusnya menjadi tertutup, dan seterusnya.



Gambar 4.
Tenda-susun Waris Adat

Keterangan:

P : Pewaris

1 : Ahli waris tingkat pertama (Anak)

2 : Ahli waris tingkat kedua (Orang-tua)

3 : Ahli waris tingkat ketiga (Kakek/nenek)

■ : Ahli waris pengganti (keturunan ahli waris)

— : Garis penggantian kedudukan

Kedudukan saudara dalam hukum adat waris Jawa Barat bukan sebagai ahli waris pokok, melainkan sebagai ahli waris pengganti orang-tua. Dengan demikian hak waris saudara akan tertutup jika orang-tua pewaris masih ada.

Dalam prakteknya, proses pewarisan pada masyarakat Jawa Barat dilakukan dengan cara pemberian mutlak. Sementara untuk harta peninggalan lain yang belum dibagikan, pada umumnya ketika pewaris masih hidup telah dibuat hibah wasiat atau wasiat tentang siapa-siapa yang diberi hak atas harta peninggalan tersebut dan berapa besar bagian masing-masing. Terutama sekali itu diberikan terhadap anggota keluarga yang secara adat tidak dipandang sebagai ahli waris, seperti janda, anak angkat, dan anak tiri. Sehingga hibah wasiat oleh Ter Haar (1981) dipandang mempunyai fungsi lain, yaitu untuk mengadakan koreksi terhadap hukum waris *abintestato* menurut peraturan-peraturan tradisional atau agama, yang dianggap tidak memuaskan lagi oleh pewaris.

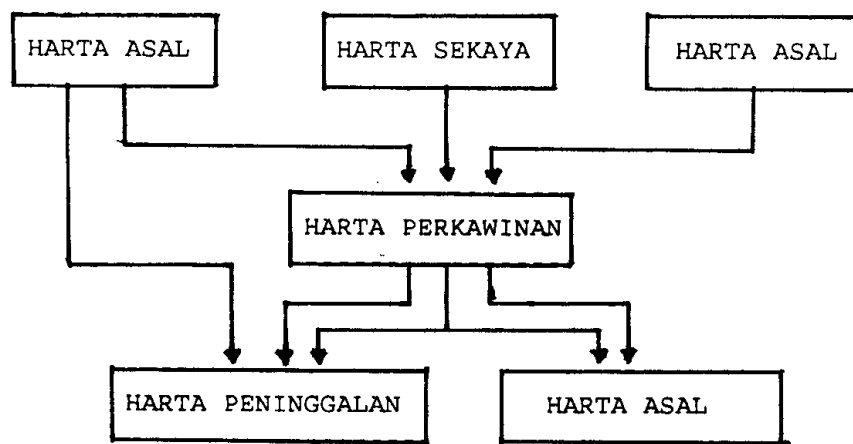
Dari uraian di atas, dapatlah penulis katakan bahwa asas manfaat dan pemanfaatan dalam hukum adat waris dapat dipandang sebagai suatu keluhuran yang sekaligus merupakan kelemahan dari hukum adat waris. Keseluruhannya adalah memperhatikan kepentingan nyata dari setiap ahli waris dan memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga yang bukan ahli waris, sementara kelemahannya adalah tidak menjamin kepastian hukum bagi ahli waris dalam hal

terdapatnya anggota keluarga yang bukan ahli waris. Itu terjadi karena memungkinkan tertundanya pembagian waris dalam waktu cukup lama sehingga status harta peninggalan menjadi mengambang dan satuannya menjadi kabur bagi pihak-pihak lain yang kemudian berkepentingan. Sebagai contoh, dari kasus-kasus dari berbagai sumber, banyak orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya yang tidak mengetahui secara persis harta peninggalan kakeknya yang merupakan bagian orang tuanya, karena harta peninggalan tersebut masih dikuasai oleh nenek dan atau paman tiri.

Dengan bertitik-tolak dari kepatuhan bahwa anggota keluarga yang bukan ahli waris jangan diterlantarkan, dan barangkali lembaga hibah dipandang kurang praktis, maka terjadilah pergeseran nilai dalam hukum adat waris Jawa Barat tentang kedudukan anggota keluarga yang bukan ahli waris. Hal itu terbukti dari putusan Makamah Agung 11 Februari 1959 yang menetapkan janda mendapat setengah bagian dari harta sekaya, putusan Makamah Agung No.302 K/Sip/1960 dan 320 K/Sip/1960 yang menetapkan janda sebagai ahli waris, dan putusan Makamah Agung 28 Juli 1964 yang menetapkan duda dan anak angkat sebagai ahli waris.

Tentang kedudukan janda sebagai ahli waris, Wirjono (1976) menyebutkan bahwa sebaiknya suami-istri saling mewaris seperti dalam hukum waris Islam. Demikian pula, Subekti (1990) menyebutkan adanya tendensi untuk menjadikan janda sebagai ahli waris dari suaminya, bersama-sama dengan anak.

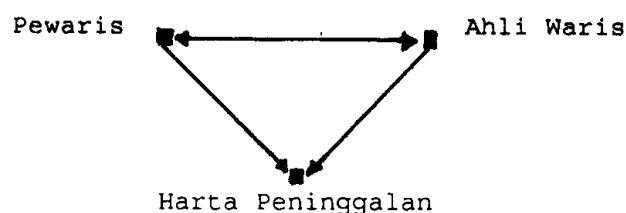
Dengan adanya perkembangan tersebut maka alur harta peninggalan dari harta asal dan harta sekaya dalam hukum adat lama, yaitu seperti ditunjukkan pada gambar 5.



Gambar 5.
Alur Harta Peninggalan dari Harta Asal dan
Harta Sekaya dalam Hukum Adat Baru

Dengan demikian maka harta peninggalan merupakan harta asal pewaris dan setengah bagian harta sekaya, sementara setengah bagian lagi merupakan bagian untuk janda, sehingga itu dapat disatukan dengan harta asalnya. Kembalinya harta asal janda dan setengah bagian harta sekaya terhadap janda merupakan perluasan penerapan cara pembagian yang sama dalam hal terjadinya perceraian. Perkembangan tersebut penulis pandang sangat rasional, bukanlah kematian pun merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan.

Namun mendudukan janda dan anak angkat sebagai ahli waris dalam hukum adat waris, penulis memandang bahwa penetapan ahli waris dalam hukum adat waris dilandasi oleh alam pemikiran konkret masyarakat adat Jawa Barat tentang keterkaitan langsung antara pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan. Keterkaitan itu digambarkan pada gambar 6.



Gambar 6.
Landasan Penetapan Ahli Waris dalam Hukum Adat

Atas dasar pemikiran itulah, maka ahli waris dalam hukum adat waris diprioritaskan terhadap mereka yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pewaris dan harta peninggalannya.

Tentang hal-hal yang perlu didahulukan sebelum pembagian waris, menurut hukum Adat Jawa Barat, adalah segala biaya yang diperlukan untuk penguburan pewaris dan penyelenggaraan upacara lainnya, serta pelunasan semua hutang pewaris, jika ada. Dalam hal harta peninggalan tidak mencukupi untuk pelunasan hutang pewaris, tidak ada satu pun ketentuan yang dapat memaksakan ahli waris untuk melunasi hutang tersebut. Namun demikian, apabila para ahli waris untuk melunasi hutang tersebut. Namun demikian, apabila para ahli waris mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang tersebut, pada umumnya hutang tersebut akan dilunasi. Dasar pemikiran hal tersebut adalah karena masyarakat Jawa Barat mengenal peribahasa *ulah paeh mawa hutang* (Jangan mati membawa hutang).

b. Sendi-sendi Dasar Hukum Waris Islam

Bagi umat Islam masalah waris tidak saja merupakan proses penerusan atau pengoperan hak dari seseorang terhadap keturunannya, melainkan merupakan salah satu ibadah yang pihak-pihak penerima warisnya telah ditentukan.

Mohammad Daud Ali (1990) mengemukakan bahwa "Asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, seperti yang disinggung di muka, diantaranya adalah (1) *ijbari*, (2) *bilateral*, (3) *individual*, (4) *keadilan berimbang*, dan (5) *akibat kematian*".

Asas *ijbari* mengandung suatu kepastian akan terjadinya peralihan harta peninggalan setelah orang meninggal dunia (pewaris) terhadap orang-orang tertentu (ahli waris), yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris, dan jumlah bagian waris setiap ahli waris telah ditentukan dengan pasti. Dengan begitu, peralihan harta peninggalan, siapa yang berhak, dan berapa bagiannya masing-

masing, menurut hukum waris Islam tidak tergantung pada kehendak si pewaris, apalagi pada kehendak para ahli waris, melainkan tergantung pada kehendak Allah Swt. karena semua yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah Swt. seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat 45:27, 48:14, 53:31, dan 57:10.

Asas bilateral berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari pihak kerabat laki-laki dan kerabat perempuan. Asas ini dapat dilihat, antara lain, pada al-Qur'an surat 4 (an-Nisa) ayat 7, 11, 12, dan 176.

Asas individual berarti, bahwa harta peninggalan diberikan terhadap ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

Asas keadilan berimbang berarti harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilakukannya. Daud Ali selanjutnya mengemukakan bahwa "Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakekatnya adalah pelanjutan tanggung-jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga".

Asas akibat kematian berarti, bahwa kewarisan hanya terjadi kalau ada yang meninggal dunia. Ini berbeda dengan kewarisan pada hukum adat waris yang memandang proses pewarisan dapat pula berlangsung pada saat pewaris masih hidup.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, dapatlah dikatakan bahwa dalam Islam, pewarisan mempunyai 3 (tiga) rukun, yaitu:

1. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat.
2. *Muwarrits* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia.
3. *Warits* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan pewaris.

Pengertian harta asal dalam Islam pada dasarnya sama dengan pengertian harta asal pada hukum adat. Begitu pula pengertian tentang harta sekaya. Kedua jenis harta tersebut tidak saja dikenal pada masa perkawinan, melainkan sesudah salah satu atau kedua suami istri tersebut meninggal dunia. Harta peninggalan si mati merupakan harta yang secara nyata merupakan hak si mati, oleh karena itu harta peninggalan merupakan gabungan antara harta asal si mati dengan harta sekaya yang merupakan hak si mati.

Namun demikian, harta sekaya perlu dilakukan pemisahan terlebih dahulu, mana yang merupakan hak si mati dan mana yang merupakan hak jandanya, jika masih ada. Ketentuan yang digunakan untuk menetapkan bagian masing-masing suami istri antara lain tercantum pada Al-Qur'an, surat 4 (an-Nisa) ayat 32 dan 34. Bagian suami lebih besar dari bagian istri, dengan penafsiran pada ayat-ayat lainnya, itu adalah 2 : 1. Perbandingan ini disebabkan suami pada umumnya adalah yang mencari nafkah. Namun apabila si istri turut pula mencari nafkah, beberapa ahli ada yang memberikan kelonggaran perbandingan tersebut adalah 1 : 1.

Dengan mengambil acuan yang pertama, jika harta asal suami adalah 200, harta asal istri adalah 150, dan harta sekaya adalah 450, maka jika si suami meninggal harta peninggalannya adalah $200 + \frac{2}{3} \times 450 = 500$, sementara jika si istri yang meninggal, maka harta peninggalannya adalah $150 + \frac{1}{3} \times 450 = 300$. Sedangkan dengan mengambil acuan yang kedua, maka jika si suami meninggal harta peninggalannya adalah $200 + \frac{1}{2} \times 450 = 425$, sementara jika si istri yang meninggal, maka harta peninggalannya adalah $150 + \frac{1}{2} \times 450 = 375$. Harta peninggalan itulah yang merupakan objek kewarisan dalam Islam.

Dalam Islam, mereka yang mempunyai hak dan dapat menerima waris adalah yang mempunyai sebab-sebab:

(1) Ahli waris berdasarkan perkawinan adalah janda dari si mati.

Yang dimaksud dengan janda di sini adalah janda yang

perkawinannya dengan si mati terputus karena kematian itu. Dalam istilah lain, itu disebut janda cerai-mati.

- (2) Ahli waris berdasarkan kekerabatan meliputi 3 (tiga) golongan, yaitu *furu'* (anak keturunan), *ushul* (leluhur), dan *hawasyi* (keluarga dalam hubungan ke samping).
- (3) Ahli waris *Wala'* meliputi kekerabatan menurut hukum yang timbul, karena membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang lainnya. Ahli waris kelompok ini timbul pada masa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Medinah dalam upaya memperteguh dan mengabadikan persaudaraan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Ikatan persaudaran tersebut dijadikan sebagai salah satu sebab saling mempusakai satu sama lain. Pewarisan atas dasar persaudaraan tersebut dibenarkan oleh Allah Swt. dalam surat al-Anfal ayat 72 dan an-Nisa. Sebagian besar ulama, kecuali Hanafiah, memandang ketentuan ini telah dinasakh oleh surat al-Ahzab ayat 6 dan surat al-Anfal ayat 75, yaitu orang yang lebih berhak terhadap harta peninggalan adalah mereka yang mempunyai hubungan darah. Hanafiah memandang itu tetap berlaku tetapi penerimaan pusaka mereka harus diakhirkan setelah penerimaan pusaka kepada dzawil-arham.

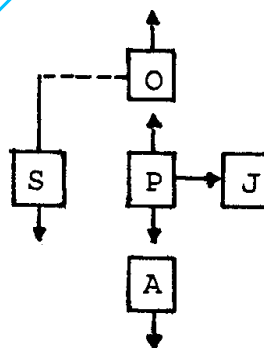
Berdasarkan petunjuk-petunjuk dari al-Qur'an, para ahli fikih membagi kerabat ke dalam 4 (empat) golongan, berdasarkan bagian waris yang akan diterimanya Fatchur (1981), yaitu sebagai berikut:

1. *Ashhabul-furudhin-nasabiyah*, yaitu golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan lain-lain. Termasuk ke dalam golongan ini adalah: Ayah, ibu, kakek, nenek, anak perempuan, cucu perempuan pacar laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu.
2. *Ashabah-nasabiyah*, yaitu golongan kerabat yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari *ashhabul-furudh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *ashhabul-furudh*.

3. Golongan kerabat yang mendapat 2 (dua) macam bagian, yaitu sebagai *fardh* dan *ashabah* bersama-sama, dalam beberapa keadaan tertentu. Termasuk ke dalam golongan ini adalah:
 - a. Ayah, bila ia mewarisi bersama-sama *far'ul* waris perempuan.
 - b. Kakek shahih, bila ia mewarisi bersama-sama *fa'ul* waris perempuan.
4. *Dzawil-arham*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua.

Besar kecilnya bagian waris setiap kerabat adalah berdasarkan derajat kekerabatan mereka. Oleh karena itu kerabat-kerabat yang derajat kekerabatannya lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak. Bahkan tidak semua kerabat akan mendapatkan waris karena hak-hak yang dimiliki oleh sebagian kerabat baru timbul jika tidak terdapatnya kerabat tertentu. Hal tersebut semuanya telah diatur secara jelas pada al-Qur'an dan al-Hadist.

Sehubungan hal tersebut di atas, siapa siapa yang merupakan ahli-waris menurut hukum waris Islam, secara sederhana, adalah seperti ditunjukkan pada gambar 7. Ahli waris utama terdiri dari janda/duda (J), anak laki-laki/perempuan (A), dan orang tua laki-laki/perempuan (O). Penggantian kedudukan anak hanya oleh keturunannya, sementara orang tua oleh leluhur dan keturunannya. Dengan demikian saudara (S) atau kerabat lainnya (ke atas dan ke samping) baru terbuka hak warisnya jika tidak terhalang oleh orang tua.



Gambar 7.

Gambaran Umum Ahli waris dan
Pergantian Kedudukan Ahli waris dalam Hukum Islam

mati; sementara bagi ahli waris hal tersebut dapat berarti berkurangnya bagian waris yang seharusnya dia peroleh.

Tentang hutang, menurut ajaran Islam harus didahulukan pelunasannya karena orang yang mati dengan meninggalkan hutang akan tertahan amal ibadahnya sampai hutang tersebut dilunasi.

Menurut ahli fikih yang bermazhab Hanafiah, wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat.

Sumber-sumber hukum tentang wasiat dapat ditemukan pada al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma, dan al-Ma'qul. Ada beberapa pandangan tentang wasiat, yakni menyangkut hukumnya, subyek hukumnya, dan batasan-batasannya. Hal-hal tersebut tidak akan dibahas secara lebih jauh, melainkan hanya akan dikemukakan tentang batasan pemberian wasiat tersebut. Wasiat dalam Islam dapat dipandang sebagai suatu terobosan yang dibenarkan untuk memberikan kesempatan bagi orang yang akan meninggalkan terhadap harta yang dimilikinya. Oleh karena itu wasiat dilakukan. Agar pewaris tidak berbuat sesuka hatinya terhadap harta peninggalannya, sehingga dapat merugikan hak-hak ahli waris yang telah ditegaskan oleh Allah, maka wasiat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan.

Di atas telah disebutkan tentang siapa-siapa yang merupakan ahli waris dan disinggung pula tentang dasar umumnya pembagian waris. Walaupun demikian, tidak setiap ahli waris dapat meminta haknya karena terhadap hal tersebut terdapat 3 (tiga) buah halangan, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama. Dengan kata lain, hak waris seorang ahli waris dapat menjadi hilang jika terhalang oleh halangan tersebut.

BAB IV. ASAS-ASAS HUKUM YANG TERCERMIN DARI PUTUSAN PENGADILAN

Pada bab ini akan dibahas putusan-putusan peradilan umum dan agama yang diambil dari salahsatu pengadilan di daerah Cirebon (Salman, 1993) yang mungkin dapat juga mewakili daerah lainnya di Jawa Barat.

A. Putusan-putusan Peradilan Umum

Putusan-putusan tersebut dapat diambil beberapa asas hukum, yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak dan cucu

Kedudukan anak, pengadilan dalam merangani perkara, yang dibuktikan adalah silsilah keluarga dari pihak yang bersengketa. Pada umumnya sengketa waris antara anak-anak pewaris, adalah akibat harta peninggalan tersebut belum dibagi. harta peninggalan tersebut, ada yang dikuasai oleh salah seorang anak atau saudara dengan alasan hibah. Oleh karena itu pengadilan juga melihat sejauh mana keabsahan dari hibah tersebut.

Kemudian pengadilan juga memandang, bahwa cucu berhak mewaris sebagai "plaatsverpuling" dari orang tuanya, apabila orang tuanya meninggal lebih dahulu.

Kedudukan anak; anak adalah merupakan ahli waris utama, sengketa yang terjadi disebabkan barang waris dikuasai oleh ahli waris pengganti (saudara, keponakan) dan atau oleh anak angkat. Sedang hasil perkara putusan pengadilan menetapkan anak sebagai ahli waris diantara putusan No.53/Pdt/1970.Pn.Cn.

Dari putusan tersebut bagian antara anak laki dan perempuan bagaiannya adalah sama, ini sesuai dengan penemuan Soepomo, bahwa di sebagian besar wilayah Jawa Barat bagian waris antara laki-laki dan perempuan adalah sama.

Kedudukan cucu; putusan pengadilan menetapkan cucu sebagai ahli waris, diantaranya putusan No.62/1962 Pn.Tjn, tanggal 13 Oktober 1962 yang bunyinya "Atas barang asal yang dimiliki oleh orang lain karena hibah, dan hibah tidak dilakukan oleh semua ahli waris adalah batal, oleh karenanya cucunya dapat menuntut hak warisnya, atas barang tersebut".

2. Kedudukan Janda

Masalah kedudukan janda, di dalam menangani permasalahan ini, pengadilan mempertimbangkan hukumnya merujuk pada perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Pula dilihat tentang kedudukan barang sengketa serta silsilah keluarga.

Tentang kedudukan janda, pengadilan berpendapat bahwa janda merupakan ahli waris dari harta *gono-giri*. Putusan pengadilan memberikan dasar putusannya mengambil pertimbangan pendapat Soepomo dalam bukunya Hukum Perdata Jawa Barat, salahsatunya adalah putusan No.33/Pdt/1968 Pn.Cn. bahwa barang yang dikuasai oleh saudara pewaris, oleh karenanya janda dan anak angkatnya merupakan ahli waris dari pewaris.

3. Hibah dan wasiat

Umumnya masalah hibah atau wasiat yang terjadi, akibat hibah tersebut dilakukan tidak sepengetahuan seluruh ahli waris, sehingga ahli waris yang merasa dirugikan merasa keberatan. Dalam menyelesaikan kasus demikian, hakim melihat proses hibah itu dilakukan, apakah dilakukan dihadapan pejabat atau hanya lisan saja. Apabila hibah dilakukan dihadapan pejabat, dan adanya saksi, maka hibah tersebut adalah sah. Hakim juga beranggapan, bahwa pemilik barang harus dihargai kebebasannya. Oleh karenanya pengalihan atas keinginan pemilik harus dihargai karena kebebasannya tersebut. Sedang asas putusan peradilan ditetapkan diantaranya No.62/1962 Pn.Tjn, tanggal 13 Oktober 1962 "Atas barang asal yang dimiliki oleh orang lain karena hibah, dan hibah tidak dilakukan oleh semua ahli waris adalah batal, oleh

karenanya cucunya dapat menuntut hak warisnya , atas barang tersebut".

4. Kedudukan anak angkat

Apakah anak angkat mendapat bagian atas harta peninggalan orang tua angkatnya hakim merujuk pada putusan Makamah Agung. Juga pada pendapat Soepomo, tentang syarat-syarat sebagai anak angkat dan bagiannya.

Diantaranya, saudara adalah ahli waris ke samping dan berhak mewaris atas harta asal sedangkan janda dan anak angkat adalah ahli waris yang berhak mewaris atas harta sekaya" dengan putusan pengadilan No.41/Pts.Pdt.G/1979 Pn.Cn. tanggal 12 Juni 1979.

5. Kedudukan anak tiri, keponakan dan saudara

Kedudukan anak tiri , keponakan dan saudara ini muncul disebabkan pewaris tidak mempunyai anak kandung. Harta peninggalan menjadi sengketa, disebabkan harta peninggalan tersebut belum dibagi, hal mana barang yang disengketakan dikuasai oleh salah satu pihak yang semestinya mendapatkan bagian waris. Penyelesaian kasus demikian, hakim melihat silsilah pewaris, bukti-bukti surat yang menguatkan status barang sengketa. Semua ini diatur berdasarkan putusan pengadilan yang salahsatunya No.17/1972 Pn.Cn. tanggal 5 Agustus 1972 yang isinya "Pewaris meninggalkan seorang suami, anak tiri dan ibu serta harta asal. Maka yang berhak atas asal adalah ibunya".

6. Kedudukan ibu

Ibu muncul sebagai pihak yang berperkara oleh karena pewaris tidak meninggalkan anak, saudara dan hanya ada suami dan anak tiri. Dalam menyelesaikan masalah ini, hakim melihat status barang yang disengketakan, apakah merupakan harta peninggalan atau bukan, silsilah keluarga, apakah telah terjadi pengangkatan anak, hibah. Kemudian ditelaah keabsahan dari bukti-bukti surat yang diajukan. Ini berdasarkan putusan pengadilan No.17/1972 Pn.Cn.tanggal 5 Agustus 1972 "Pewaris meninggalkan seorang suami,

anak tiri dan ibi serta harta asal. Maka yang berhak atas harta asal adalah ibunya".

Secara umum, sengketa waris terjadi karena 2 (dua) hal pokok, yaitu karena "sebab barang dan sebab orang". Sengketa waris karena *sebab barang*, umumnya terjadi karena terdapatnya pandangan yang berbeda terhadap harta peninggalan. Hal tersebut terjadi karena pada masyarakat Jawa Barat, harta peninggalan belum dibagi apabila salah satu pihak (suami/istri pewaris) masih hidup. Sedang sengketa waris karena *sebab orang*, umumnya terjadi karena terdapatnya ahli waris tertentu yang merasa dirinya lebih dekat dengan si pewaris, sehingga memandang dirinya adalah yang paling berhak atas harta peninggalan si pewaris.

Namun demikian, pola sengketa yang timbul, umumnya merupakan reaksi dari pihak lain yang memandang dirinya mempunyai hak pula terhadap barang yang disengketakan. Reaksi tersebut timbul karena tidak adanya keterbukaan dari sebagian ahli waris terhadap ahli waris lainnya tentang status dan kedudukan barang sengketa dalam budel harta peninggalan. Oleh karena itu, reaksi tersebut dapat dipandang sebagai upaya sebagian ahli waris, yang tersisih, untuk mendudukan barang sengketa pada tempat yang sebenarnya pada harta peninggalan yang hendak dimintakan penetapan ahli waris dan bagian warisnya.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pengadilan, sesuai dengan hukum acara dalam perkara perdata, terlebih dahulu menetapkan kedudukan para pihak dalam hubungannya dengan si waris, yakni untuk menetapkan siapa-siapa yang merupakan ahli waris dari si pewaris; kemudian menetapkan status barang sengketa dalam harta peninggalan, apakah merupakan atau tidak merupakan bagian dari harta peninggalan; dan menetapkan bagian waris bagi para pihak yang dipandang merupakan ahli waris. Tentang hukum yang digunakan sebagai dasar dari putusan tersebut, secara umum adalah sesuai dengan penemuan-penemuan Soepomo tentang hukum waris adat Jawa Barat, namun ada pula yang berbeda. Perbedaan

yang cukup mencolok adalah menyangkut kedudukan anak angkat dan janda sebagai ahli waris.

B. Putusan-putusan Peradilan Agama

Putusan-putusan peradilan agama yang ditemui di Jawa Barat tahun 1985, sedang tahun sebelumnya tidak diperoleh karena kesulitan pengarsipan pada pengadilan agama tersebut. Pada bagian ini tidak akan dikemukakan rangkuman untuk setiap putusan pengadilan agama. Hal tersebut dilakukan karena pada umumnya perkara waris yang diajukan pada pengadilan agama tidak merupakan sengketa, melainkan berupa permohonan penetapan ahli waris dan pembagian waris yang diajukan oleh seluruh ahli waris dengan pilihan hukum Islam.

Dari seluruh perkara ternyata umumnya dimohon untuk keperluan yang bersifat intern atau ekstern. Permohonan penetapan ahli waris yang bersifat intern umumnya selalu diikuti permohonan penetapan bagian waris untuk setiap ahli waris. Permohonan tersebut umumnya didasari oleh keinginan para ahli waris untuk menggunakan hukum Islam dalam proses pewarisan yang hendak mereka lakukan. Sementara itu, permohonan penetapan ahli waris yang bersifat eksteren umumnya diajukan guna kepentingan ahli waris bertindak selaku pengganti pewaris dalam hubungannya dengan pihak lain. Hal tersebut terutama untuk penyelesaian piutang-piutang pewaris dari pihak lain.

Sikap pemohon terhadap penetapan pengadilan agama untuk perkara yang mereka ajukan, umumnya dapat dikatakan menerima dengan baik penetapan tersebut. Hal itu terjadi karena niat awal pemohon tidak untuk menyelesaikan sengketa, melainkan lebih cenderung meminta petunjuk tentang bagaimana hal tersebut seharusnya menurut hukum Islam.

**BAB V. KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM**

Telaah hukum untuk mengetahui kesadaran hukum terhadap beberapa sistem hukum sejenis mempunyai karakteristik yang berbeda dengan suatu kajian hukum terhadap satu sistem hukum saja. Dalam berbagai kajian hukum, terbuka kemungkinan berbaurnya kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem hukum tersebut. Oleh sebab itu analisis terhadap setiap indikator kesadaran hukum memerlukan acuan yang bervariasi. Secara umum, analisis tersebut meliputi 2 (dua) hal pokok, yaitu:

1. Seberapa jauh kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem hukum tertentu (yang dianut);
2. Terhadap sistem hukum manakah kecenderungan kesadaran hukum masyarakat ?

Dari hasil analisis pertama cenderung untuk melihat kesadaran hukum masyarakat, yang menyatakan diri tunduk pada suatu sistem hukum tertentu, terhadap sistem hukum itu sendiri. Dan ternyata kelompok yang menundukkan diri terhadap sistem hukum Islam merupakan kelompok terbesar, berjumlah 50.05% yang sebaiknya mengatur masalah waris, sedang kelompok kedua sebanyak 21.56% yang menundukkan diri terhadap sistem hukum adat. Namun demikian, dari hasil kajian diperoleh fakta bahwa kesadaran hukum anggota setiap kelompok terhadap sistem hukum yang dianutnya tersebut relatif kurang. Pengetahuan dan pemahaman terhadap sistem hukum tersebut tidak menunjukkan hubungan yang erat dengan sikap dan pola perilaku hukumnya.

Pandangan ini tampak seolah-olah tidak terdapat hubungan yang nyata antara indikator kesadaran hukum yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi alangkah bijaknya kalau kita mau melihat apa yang terdapat di balik semua itu. Pengetahuan tentang sistem hukum bagi masyarakat Jawa Barat, yang diketahui ternyata relatif rendah, menurut hemat penulis, adalah wajar kerana beberapa alasan, yaitu:

- a. Masyarakat Jawa Barat tidak pernah secara nyata mendapatkan pendidikan tentang sistem hukum, khususnya masalah waris;
- b. Sistem kewarisan merupakan masalah yang jarang terjadi, yaitu umumnya hanya terjadi 2 (dua) kali seumur hidup, yakni ketika orang-tua meninggal dunia. Itu berlainan dengan hukum lalu-lintas, pajak, tanah, dan lain-lain, yang dalam kehidupan sehari-hari dialami oleh setiap pribadi.
- c. Sistem kewarisan berada pada lingkungan hukum perdata, sehingga peranan aparat hukum dan perundang-undangan tidak tampak jika tidak ada perkara yang diangkat.

Namun demikian tentang pemahaman hukum masyarakat. Seperti disebutkan oleh Soerjono Soekanto:

"..... pengetahuan tentang isi peraturan dipengaruhi oleh proses internalisasi dan imitasi" maka dapat dipahami mengapa hukum masyarakat relatif lebih baik. Faktor imitasi di samping mempunyai nilai positif juga dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif, yaitu dalam hal yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang. terlebih lagi jika peniruan itu hanya terhadap kulitnya saja, bukan substansinya. Sebagai misal, pemberian bagian waris terhadap anak angkat dipandang sebagai prose pewarisan, sehingga anak angkat dipandang sebagai ahli waris, padahal mungkin itu sebagai hibah, wasiat, atau sedekah".

Sikap masyarakat Jawa Barat memilih sistem hukum Islam sebagai sistem hukum yang sebaiknya mengatur masalah waris pun tidak menunjukkan sikap yang sebenarnya, karena fakta-fakta lainnya yang berkaitan dengan sikap terhadap sistem hukum tersebut tidak menunjang, bahkan cukup banyak yang bertentangan. Menurut hemat penulis, sikap masyarakat memilih sistem hukum Islam lebih disebabkan oleh faktor rasional beragama yang tidak mencerminkan pengetahuan dan pemahaman tentang hal itu. Mereka sebagai umat Islam seyogyanya tunduknya pada sistem hukum Islam, sementara itu bagaimana sistem hukum Islam mengatur masalah waris mereka kurang mengetahui dan memahaminya. Disitulah letak hubungan antara indikator pengetahuan dan pemahaman hukum dengan

sikap terhadap hukum dapat ditemukan, yaitu akibat pengetahuan hukum yang rendah serta pemahaman hukum yang salah mengakibatkan sikap terhadap hukum menjadi salah.

Kemudian, sistem hukum manakah kecenderungan kesadaran hukum masyarakat ? Dengan melihat dari hasil penelitian terlihat bahwa kecenderungan tersebut adalah terhadap sistem hukum adat. Namun demikian, dengan memperhatikan bias terhadap masing-masing kelompok masyarakat sampel, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Kelompok masyarakat Islam yang kesadaran hukumnya cenderung pada sistem hukum adat disebabkan oleh pengetahuan dan pemahamannya tentang sistem hukum Islam yang rendah. Sementara kelompok masyarakat adat yang kesadaran hukumnya cenderung pada sistem hukum Islam disebabkan salah mengira bahwa sistem hukum adat itu sama dengan sistem hukum Islam.

Sehubungan uraian di atas serta uraian-uraian terdahulu, dapatlah dikemukakan bahwa sistem hukum adat dan sistem hukum Islam, dalam masalah kewarisan, keduanya merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Keduanya berjalan beriringan, berbaur, dan kadangkala berbenturan dalam mengisi kebutuhan hukum masyarakat.

Penulis berpandangan bahwa hukum waris merupakan salah satu bidang hukum keperdataan, yang penanganannya lebih banyak bergantung pada para pihak yang terlihat (para ahli waris). Proporsi perkara waris yang masuk ke pengadilan sangatlah kecil bila dibandingkan dengan jumlah kematian yang terjadi. Padahal pada setiap kematian terdapat masalah kewarisan.

Keterkaitan dengan hukum tanah dan kepemilikan barang atas-nama lainnya, hukum waris nasional diperlukan guna memudahkan administrasi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan. Cukup banyak kasus-kasus yang ditemui harta peninggalan yang belum dibagikan karena masih terdapatnya janda atau anak yang belum dewasa. Harta peninggalan seperti itu masih tercatat atas nama almarhum. Secara hukum itu tidak benar, orang

yang sudah meninggal tidak lagi merupakan subjek hukum sehingga tidak lagi dipandang sebagai pemilik harta peninggalan. Secara administratif, hal itu pun cukup menyulitkan, seperti kepada siapa penarikan pajak atas harta peninggalan tersebut harus dilakukan. Karena salah seorang ahli waris tidak mustahil akan menolak melakukan itu dengan alasan belum ada pembagian waris. Begitu pula hak-hak pihak ketiga, yang mempunyai piutang pada almarhum, dapat terkatung-katung haknya oleh alasan harta peninggalan belum dibagi. Mayoritas kasus waris disebabkan oleh penundaan pembagian harta peninggalan, sehingga harta peninggalan menjadi kabur dan ahli waris tidak mendapatkan haknya.

Hal-hal yang menyangkut masalah kewarisan, khususnya menyangkut masalah harta peninggalan, ada diatur pada Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Harta benda dalam perkawinan, dalam undang-undang tersebut, dibedakan antara harta bersama dan harta bawaan. Namun demikian, sekalipun dikemukakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan, undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas kedudukan atau petunjuk ke arah itu untuk harta bawaan sebagai akibat putusnya perkawinan. Begitu pula tentang harta bersama, pasal 37 undang-undang perkawinan hanya menyebutkan bahwa "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*". Apa yang dimaksud dengan kata "*hukumnya masing-masing*" tidak ada penjelasan lebih jauh.

Kendati demikian, dengan mengaitkannya pada pasal-pasal lainnya, dapatlah dikemukakan hal-hal penting dari undang-undang perkawinan yang akan sangat bermanfaat bagi hukum kewarisan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Undang-undang perkawinan mengakui adanya adanya pemisahan/pembedaan harta bersama dan harta bawaan masing-masing sepenuhnya merupakan hak masing-masing pihak. Sementara harta bersama merupakan hak bersama, setiap pihak

dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Itu berarti bahwa kedudukan suami dan istri adalah sederajat terhadap harta bersama.

- (2) Pengaturan harta bersama dalam hal terjadinya perceraian diatur oleh hukumnya masing-masing. Apabila itu dikaitkan dengan pasal 2 ayat (1) maka yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing tersebut adalah hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak.
- (3) Apabila terhadap harta bersama diterapkan hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak, apakah itu dapat diperluas menjadi terhadap harta bawaan pun diterapkan hukum agama atau kepercayaannya itu.
- (4) Apabila terhadap perceraian dapat diterapkan hukumnya masing-masing untuk pembagian harta dalam perkawinan, apakah itu pun dapat diterapkan untuk putusannya perkawinan karena kematian atau atas keputusan Pengadilan. Bukankah substansi ketiganya adalah sama, yaitu memutuskan tali perkawinan, sementara perbedaannya hanyalah terletak pada pihak yang berhak menerima bagian harta perkawinan itu, yaitu dalam hal perceraian adalah masing-masing pihak, sementara dalam kematian adalah salah satu pihak dan ahli-warisnya.

Menurut hemat penulis dari data pustaka melihat adanya dualisme hukum waris yang diterapkan pada praktik peradilan, yaitu sistem hukum Islam pada peradilan agama dan sistem hukum adat pada peradilan umum. Dualisme hukum untuk subyek hukum yang sama pada peradilan yang berbeda kurang menjamin kepastian hukum.

Kemudian dengan diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, penulis melihat ada suatu perkembangan baru politik hukum Indonesia tentang hukum waris. Undang-undang tersebut memang bukan undang-undang tentang kewarisan, akan tetapi dari tugas dan wewenang Peradilan Agama,

seperti tertulis pada pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang tersebut, yaitu:

- a. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - perkawinan
 - kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
 - shadaqah.
- b. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Rumusan di atas tampak secara jelas bahwa wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara waris bagi yang beragama Islam sepenuhnya ada pada Peradilan Agama dan sistem hukum Islam. Kedudukan putusan peradilan agama pun tidak lagi berupa fatwa, yang perlu mendapat pengukuhan dari peradilan umum, melainkan berdiri sendiri.

Memang ada beberapa pihak yang masih menyangsikan kewenangan peradilan agama dalam pemeriksaan perkara waris, yaitu melihat rumusan pasal 50 Undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa:

Dalam hal terdapat sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dengan perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Apabila rumusan pasal tersebut dikaji lebih jauh, itu hanya untuk memperjelas kewenangan peradilan agama dan peradilan umum dalam menyelesaikan perkara waris. Kewenangan peradilan umum terbatas pada penyelesaian sengketa tentang status suatu barang, apakah itu termasuk harta peninggalan atau bukan. Sementara

masalah penentuan ahli-waris, harta peninggalan, dan bagian waris bagi setiap ahli waris sepenuhnya merupakan wewenang peradilan agama.

Dengan keluarnya Instruksi Presiden R.I. No.1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Dalam konsideran menimbang dari Inpres tersebut dinyatakan:

1. bahwa para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988 telah menerima baik rancangan buku kompilasi hukum Islam , yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;
2. bahwa kompilasi hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Dalam sistem hukum waris adat, seperti ditemukan Soepomo pada 50 tahun lalu, pihak yang dipandang sebagai ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, dalam hubungan garis lurus ke bawah (keturunan) atau ke atas (leluhur). Prioritas ahli waris berada pada keturunan, seberapa pun menurunnya. Leluhur hanya akan mendapatkan bagian waris jika tidak terdapat keturunan. Sejalan dengan prioritas tersebut, pergantian kedudukan dalam sistem hukum waris adat mempunyai prioritas terhadap keturunan pula. Namun demikian dikenal pula pembagian *sepikul segendong*, yang dipandang sebagai pengaruh hukum waris Islam terhadap hukum waris adat. Oleh karena itu, umumnya laki-laki mendapatkan sawah/ladang (modal usaha), sementara perempuan mendapatkan rumah/pekarangan.

Dalam sistem hukum waris adat, janda dan anak angkat tidak dipandang sebagai ahli waris, melainkan sebagai anggota keluarga yang dipandang perlu mendapat perlindungan kehidupan jika ditinggal mati. Oleh karena itu, sekalipun mereka tidak berhak

mendapatkan waris, tetapi mereka mempunyai hak pakai atau hak untuk menikmati hasil harta peninggalan selama mereka hidup atau membutuhkannya. Hak istimewa itulah yang menjadi harta peninggalan selama mereka hidup atau membutuhkannya. Hak istimewa itulah yang menjadikan harta peninggalan belum dibagi selama janda atau anak angkat masih hidup. Dalam kenyataannya, hak istimewa yang dimiliki janda atau anak angkat seringkali disalahgunakan.

Nilai luhur hukum waris adat yang melindungi penghidupan anggota keluarga bukan ahli waris, maka dalam perkembangannya kemudian hukum waris adat memandang janda dan anak angkat dapat menerima waris secara mutlak untuk harta gono-gini. Fakta itu menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem hukum waris adat tentang siapa-siapa yang merupakan ahli waris. Dalam perkembangan itu, landasan penetapan ahli waris dalam sistem hukum waris adat didasarkan pada hubungan yang nyata (konkret) pewaris, harta peninggalan, ahli-waris, yaitu seperti ditunjukkan pada Gambar 6. Namun demikian, itu tidak mengurangi sistem yang telah ada, yaitu bahwa janda dan anak angkat tetap masih memiliki hak pakai atau hak untuk menikmati hasil dari harta peninggalan. Oleh karena itu, sampai sekarang banyak dijumpai harta peninggalan yang belum dibagi karena masih ada janda atau anak angkat.

Sehubungan tersebut di atas, kaitannya dengan rencana pembentukan hukum waris nasional serta tertib administrasi pemilikan barang, khususnya barang atas-nama, maka penundaan pembagian waris yang dikenal dalam sistem hukum waris adat dipandang tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian administrasi maka pembagian waris harus segera dilakukan sepeninggalnya pewaris. Tentang hak istimewa janda dan anak angkat, jika itu dipandang perlu dipertahankan, itu dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian hak pakai. Dengan kata lain, hak miliknya berada pada

ahli waris, sementara hak-pakainya berada pada janda atau anak angkat.

Namun demikian, melihat perkembangan bahwa janda dan anak angkat dewasa ini dipandang sebagai pihak yang mendapatkan waris, maka penulis memandang hak istimewa/hak-pakai tersebut tidak diperlukan lagi. Jaminan penghidupan janda dan anak angkat dipandang cukup dari bagian yang mereka terima.

Dalam sistem hukum waris Islam, seperti telah dikemukakan di atas, pihak yang dipandang sebagai ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan si pewaris, dalam hubungan garis lurus ke bawah (keturunan) atau ke atas (leluhur), serta pihak yang terikat tali perkawinan (janda). Tidak terdapat prioritas ahli waris pada ketiga pihak tersebut, dalam arti hak suatu pihak tergantung pada keberadaan pihak lainnya. Ketiganya mempunyai kedudukan yang sama dengan bagian yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, pergantian kedudukan dalam sistem hukum waris Islam mempunyai ciri yang khas, yaitu terbatas pada ahli waris berdasarkan kekerabatan.

Oleh karena itu, pemberian harta peninggalan terhadap cucu pancar perempuan atau anak angkat harus dilakukan melalui hibah, wasiat, atau pemberian hak lainnya. Namun demikian, jika itu tidak dilakukan maka itu dipandang akan dilakukan jika si pewaris masih hidup. Itu dinamakan *Wasiat Wajibah*, artinya perkembangan sistem kewarisan adat yang mendudukan anak angkat sebagai ahli waris dapat diakomodasi oleh lembaga hibah, wasiat, atau wasiat wajibah.

Dari uraian di atas, dapat dilihat titik temu antara sistem hukum kewarisan adat dan Islam. Semua hal menyangkut ahli waris yang dikenal dalam sistem hukum adat dapat diakomodasikan oleh sistem hukum kewarisan Islam. Dengan suatu catatan bahwa pengetahuan hukum masyarakat tentang lembaga-lembaga yang dapat digunakan untuk mengakomodasi oleh sistem hukum kewarisan Islam. Dengan suatu catatan bahwa pengetahuan hukum masyarakat tentang

lembaga-lembaga yang dapat digunakan untuk mengakomodasi hal-hal tersebut cukup baik.

Dengan demikian, tinggal satu hal lagi yang perlu dicari titik-temu antara sistem hukum kewarisan adat dan Islam, yaitu dalam hal perbandingan bagian waris laki-laki dan perempuan. Sikap dan pola yang terbentuk tersebut tidak menunjukkan konsistensi sikap masyarakat yang mayoritas bersikap untuk memilih hukum Islam sebagai hukum yang mengatur masalah waris.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, penulis memandang perlu untuk mengangkat pendekatan secara keagamaan terhadap para pihak yang setuju dengan pembagian sama tersebut, yaitu dengan penekanan hal-hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan hukum waris Islam, bagi kaum muslimin, merupakan suatu keharusan/kewajiban.
2. Secara lahiriah harta peninggalan merupakan milik almarhum, akan tetapi hakikatnya adalah milik Allah Swt. Oleh karena itu maka kaum muslimin harus tunduk pada ketentuan-ketentuan waris yang telah ditetapkan Allah Swt., baik menyangkut siapa-siapa yang merupakan ahli waris maupun bagiannya masing-masing.
3. Apabila hukum waris Islam telah dilaksanakan dan para pihak kemudian berkehendak untuk menyamakan bagian masing-masing, itu dapat dilakukan melalui perbuatan hukum yang lain, yaitu antara lain melalui hibah. Sebagai misal, jika almarhun/almarhumah meninggalkan 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan, maka bagian untuk setiap anak laki-laki adalah $\frac{2}{5}$ bagian dan untuk anak perempuan adalah $\frac{1}{5}$ bagian. laksanakan pembagian seperti itu terlebih dahulu untuk memenuhi hukum waris Islam. Selanjutnya, jika memang para pihak sepakat untuk menyamakan bagiannya masing-masing, sehingga setiap pihak akan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian, maka hibahkanlah dari hak setiap anak laki-laki sebanyak $\frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{6}{15} - \frac{5}{15} = \frac{1}{15}$ bagian terhadap saudaranya yang perempuan.

Dengan penekanan seperti itu, maka tampaklah bahwa pembagian waris adat, yang menyamakan bagian waris anak laki-laki dengan anak perempuan, dapat pula diakomodasikan oleh hukum waris Islam melalui 2 (dua) perbuatan hukum, yaitu pewarisan dan penghibahan.

Dari uraian-uraian di muka, sampailah penulis pada suatu kesimpulan bahwa perkembangan sistem hukum kewarisan adat menuju pada arah yang sama dengan sistem hukum kewarisan Islam. Semua masalah dalam sistem hukum kewarisan adat dapat diakomodasi oleh sistem hukum kewarisan Islam.

BAB VI. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang disajikan pada bab-bab yang lalu, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

A. Umum

1. Hukum waris yang berlaku dalam masyarakat adalah hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris tertulis (KUH Perdata Indonesia).
2. Masyarakat lebih banyak menerangkan hukum waris adat, sedangkan penerapan hukum waris Islam sangat terbatas.
3. Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris yang berlaku relatif rendah.

B. Khusus

1. Pembahasan tentang hukum waris, pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yaitu ahli waris dan harta peninggalan. Oleh karena itu, pembahasan harus dimulai dari hukum Kekeluargaan dapat membantu menggambarkan ketentuan-ketentuan tentang pertalian darah, hubungan orang tua dengan anak, dan pengambilan anak; Sementara hukum perkawinan dapat membantu menggambarkan ketentuan-ketentuan

- harta asal, harta bersama, dan harta peninggalan, pada sistem-sistem hukum yang sedang diteliti.
2. Hukum adat pada dasarnya hanya mengenal pemisahan harta asal dan harta bersama selama suami istri masih hidup, sementara apabila salah seorang dari mereka atau keduanya meninggal maka semua harta asal dan harta bersama menjadi satu, yaitu dipandang sebagai harta peninggalan. Hal tersebut terjadi pada suatu perkawinan yang normal (terdapat keturunan), sementara pada perkawinan yang tidak normal pemisahan harta asal dan harta bersama masih tetap ada.
 3. Pemisahan harta asal dan harta bersama sebetulnya berkaitan erat dengan masalah hak suami istri dalam terjadinya perceraian dan masalah hak ahli waris dalam hal terjadi kematian. Oleh karena itu pada perkawinan yang normal, hukum Adat tidak mengenal pemisahan kedua jenis harta tersebut, karena pada perkawinan itu yang merupakan ahli waris untuk keseluruhan harta peninggalan adalah anak-anaknya; sementara hukum Islam tetap memisahkan kedua jenis harta tersebut karena anak bukan satu-satunya ahli waris.
 4. Hukum adat memandang janda (baik perempuan atau laki-laki) bukan sebagai ahli waris dari suami/istrinya. Namun demikian, dia mempunyai hak untuk menikmati hasil dari seluruh harta peninggalan selama dia membutuhkannya dan selama hidupnya, dengan batasan dia tidak melakukan perkawinan lagi. Itulah sebabnya maka harta peninggalan, baru dibagi jika kedua suami istri tersebut meninggal dunia.

Sementara hukum Islam memandang janda sebagai ahli waris dari suami/istrinya. Harta peninggalan umumnya dibagi segera setelah seseorang meninggal. Pembagian tersebut pada umumnya baru berujud pemindahan hak milik, karena bila

- janda masih ada, umumnya penguasaan harta peninggalan masih dilakukan oleh janda.
5. Kedudukan anak angkat dalam hukum adat, dipandang sama dengan janda, yaitu bukan sebagai ahli waris, namun dia mempunyai hak untuk menikmati hasil seluruh harta peninggalan selama dia membutuhkannya dan selama hidupnya. Sementara itu, kedudukan anak angkat dalam hukum Islam tidak sama dengan anak kandung, bahkan bukan merupakan kerabat jika anak tersebut bukan diambil dari anggota kerabat. Ketegasan tentang anak angkat dalam hukum Islam merupakan koerksi langsung dari Allah Swt. terhadap kebiasaan pada Zaman jahiliah yang memandang anak angkat sebagai anak kandung.
 6. Hukum adat mengenal dua macam anak yang mempunyai pertalian darah langsung dengan orang-tuanya, yaitu anak sah dan anak zina (anak jadah). Pengertian anak sah menurut hukum adat adalah anak-anak yang dilahirkan di dalam suatu perkawinan, sementara anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Berbeda dengan itu, hukum Islam mengenal juga anak Li'an, yaitu anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah tetapi ditolak oleh si suami karena menduga bahwa anak tersebut hasil zina si istri dengan laki-laki lain.
 7. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum yang diteliti relatif kurang. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki relatif kurang pula. Itu sebabnya, sekalipun pada umumnya masyarakat Jawa Barat bersikap ingin menerapkan hukum Islam pada proses pewarisan, tapi ternyata dalam praktek hukum adatlah yang dipergunakan.
 8. Sejalan dengan hal-hal di atas dalam perkembangannya lebih lanjut ternyata kedudukan janda dan anak angkat dalam hukum adat dipandang oleh lembaga Peradilan umum sebagai ahli

waris untuk seluruh harta bersama. Dalam hukum adat penetapan ahli waris cenderung berdasar pada asas kepatutan secara konkret, yaitu dengan melihat hubungan berkait antara pewaris, harta peninggalan dan ahli waris. Terlepas dari masalah dasar pertimbangan yang berbeda dari kedua sistem hukum yang dikaji, adanya kecenderungan bahwa kedua sistem tersebut bergerak pada arah yang sama.

9. Dalam putusan-putusan lembaga Peradilan ternyata sengketa waris terjadi karena dua hal pokok, yaitu karena sebab barang dan sebab orang. Sengketa waris karena sebab barang umumnya terjadi karena harta peninggalan belum dibagi selama janda atau anak angkat masih hidup, sehingga memungkinkan terjadinya pengasingan terhadap harta peninggalan tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris. Sengketa waris karena sebab orang umumnya terjadi karena harta peninggalan sering kali dikuasai oleh salah satu atau sekelompok ahli waris tertentu dengan mengabaikan hak-hak ahli waris yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail Saleh, Wawasan Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta, Kompas Juni 1989
- Mura P. Hutagalung, Hukum Islam Dalam Era Pembangunan, Jakarta, Hill-Co, 1985, halaman 12
- H.A. Dasuki dkk. Sejarah Indramayu, tanpa penerbit dan tahun, halaman 33
- Sajuti Thalib, Receptio A Contrario, Jakarta: Bina Aksara, 1985, halaman 4
- Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Jakarta, Gunung Agung, 1984, halaman 4
- R. Soepomo dan R. Djokosutono, Sejarah Politik Hukum Adat Djilid I, Jakarta, Djambatan, 1955, halaman 2
- R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, halaman 81
- L.B. Curzon, Jurisprudence, Macdonald & Evans Ltd. Plymouth, 1979, halaman 155-156
- Jellinek, Georg, Allgemeine Staatlehre, Bad Hamburg V.D. Hoge Berlin, Zurich, Max Gehlen Dritte Auflage, 1992, halaman 180
- Logemann, Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht, Jakarta, Saksama, 1954, halaman 14
- Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Bandung, Alumni, 1987, halaman 53
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Rajawali Press, 1983, halaman 284

Doyle P. Jonson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jakarta, PT. Gramedia, 1986, halaman 128

Ter Haar Bzn. (penterjemah: Soebakti Poesponoto), Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, halaman 184

UNIVERSITAS TERBUKA